

Pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila pada Karang Taruna Desa Mlese Kabupaten Klaten Menuju *Digital Society*

Anita Trisiana¹, Yusuf², Ama Farida Sari³, Aiyu Nur Rohmah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Slamet Riyadi

¹anita.trisiana@unisri.ac.id

Received: 9 Agustus 2022; Revised: 21 November 2022; Accepted: 5 Desember 2022

Abstract

Various forms of communication as a result of technological advances have brought positive impacts in the countryside, one of which is breaking the long bureaucracy, so that communication links between village and district/city governments are more effective. Another phenomenon, shows the existence of socio-cultural conflicts, such as the prevalence of juvenile delinquency, cases of drug use, and various other phenomena that lead to the nation's moral degradation. For this reason, as one of the efforts made to empower the community to overcome the problem of exemplary crises, a more effective approach can be used, one of which is the Pancasila values approach. Character will emerge when exemplary has been accustomed in the life of our society. Character needs to be developed and proclaimed, in relation to the depletion of morality. So, to overcome this nation's problems, one of them is to strengthen the United Indonesia Movement in the Context of Digital Society. The target audience in this community partnership program is the non-productive community, namely Karang Taruna Mlese Village in Klaten Regency. The target audience is used as a Pancasila Pioneer Village that requires empowerment of education and training in the form of Character Development Training activities. While the method used in this partnership program is CIPP based on Context (Context), Inputs (Input), Process (process), and product (product). The results of the service show that there is an increase in the knowledge and understanding of the youth groups towards the values of Pancasila, this training activity is one of the activities that can support and filter the problems of socio-cultural conflicts in society. The use of digital technology that utilizes the village internet is in line with the realization of a digital society that can be directed towards developing the potential of the village economically and socially. The existing social system in the Mlese community needs continuous assistance, through various service activity programs to add insight into skills in increasing the achievement of village project programs, namely as a pioneer village of Pancasila.

Keywords: *community empowerment; pioneer village; pancasila; digital society*

Abstrak

Berbagai bentuk komunikasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi telah membawa dampak pengaruh positif di pedesaan, salah satunya memutus birokrasi yang panjang, sehingga lebih efektif jalinan komunikasi antara pemerintah desa dan kabupaten/kota. Fenomena lain, menunjukkan adanya konflik sosio-kultur, seperti masih maraknya kenakalan remaja, kasus penggunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai fenomena lainnya yang memunculkan adanya degradasi moral bangsa. Untuk itu, sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat untuk menaggulangi permasalahan krisis ketaladanan dapat menggunakan pendekatan yang lebih efektif, salah satunya pendekatan

nilai-nilai Pancasila. Karakter akan muncul manakala keteladanan sudah dibiasakan di dalam kehidupan masyarakat kita. Karakter perlu dikembangkan dan dicanangkan, dalam kaitannya dengan menipisnya moralitas. Maka untuk mengatasi persoalan bangsa ini salah satunya adalah memberikan penguatan Gerakan Indonesia Bersatu Dalam Rangka *Digital Society*. Khalayak sasaran dalam program kemitraan masyarakat ini adalah Masyarakat Non Produktif, yaitu Karang Taruna Desa Mlese di Kabupaten Klaten. Khalayak sasaran tersebut dijadikan sebagai Desa Pelopor Pancasila yang memerlukan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan berupa kegiatan Diklat Bina Karakter. Sedangkan Metode yang dipakai dalam program kemitraan ini adalah CIPP berdasarkan Context (Konteks), Inputs (Input), Process (proses), dan product (produk). Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman karang taruna terhadap nilai-nilai Pancasila, kegiatan diklat ini sebagai salah satu kegiatan yang dapat menopang dan menyaring permasalahan konflik sosio-kultur dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital yang memanfaatkan internet desa, selaras dengan terwujudnya *digital society* yang dapat diarahkan untuk pengembangan potensi desa secara ekonomi maupun sosial. Sistem sosial yang ada pada masyarakat Mlese perlu terus menerus dilakukan pendampingan, melalui berbagai program kegiatan pengabdian untuk menambah wawasan keterampilan dalam peningkatan ketercapaian program project desa yaitu sebagai desa pelopor Pancasila.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; desa pelopor; pancasila; *digital society*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa, sangat dimungkinkan dapat mengakses keseluruhan teknologi digital. Ruang ini menjadi alternatif ruang publik dominan yang dikendalikan dan dikelola oleh media massa atau oleh lembaga birokrat-formal (pemerintah pusat). Dengan memiliki *Digital skill*, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan teknologi saat ini yang pada akhirnya dapat beradaptasi dan hingga pada suatu kondisi tertentu dapat menghasilkan nilai ekonomi. Digitalisasi pada masyarakat pedesaan memunculkan berbagai dampak yang akan berpengaruh terhadap kehidupan *socio cultural* masyarakat.

Menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat seperti maraknya ideologi khilafah, penggunaan isu SARA, aksi persekusi ormas, dan intoleransi yang seakan menggambarkan mudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini tentu memicu mudahnya gesekan di masyarakat yang bisa mengancam stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Maka kemudian Presiden membentuk Unit Kerja

Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Selaras dengan *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), serta olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kusuma, 2007; Budimansyah, 2010; Irwan 2010; Mansyur, 2011). Implementasi *grand design* pendidikan karakter berhubungan langsung dengan kecakapan kewarganegaraan yang meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Berdasarkan hasil penelitian hibah Fundamental (Sugriyo, 2012) dengan judul “Strategi Pengembangan *Grand Design* Pendidikan Karakter sebagai Upaya Penguatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa

Pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila pada Karang Taruna Desa Mlese Kabupaten Klaten Menuju *Digital Society*

Anita Trisiana, Yusuf, Ama Farida Sari, Aiyu Nur Rohmah

dan Bernegara di Surakarta)” menyatakan bahwa ”94 % strategi pengembangan grand desain pendidikan karakter tidak hanya efektif dalam pendidikan tetapi diperlukan juga penguatan yang lebih focus mengintegrasikan pendidikan dalam keluarga dan dalam masyarakat, sehingga mendukung kebijakan pemerintah berkaitan dengan Desa Pelopor Pancasila untuk mendukung revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan Jawa Tengah”. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan *grand design* pendidikan karakter perlu dimplementasikan secara efektif dalam masyarakat sebagai wujud pendukung kebijakan pendidikan karakter.

Permasalahan *sosio cultural* yang muncul sebagai akibat dari krisis keteladanan sebagai dampak dari permasalahan *degradasi moral* yang terjadi pada bangsa Indonesia. Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program grand design pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan karakter antara lain: penyediaan guru yang berkualitas masih belum terlaksana terutama guru dengan kualifikasi lebih baik. Selain itu minat guru perempuan untuk mengajar di daerah juga sangat sulit. Permasalahan mitra tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Mitra

No	Aspek	Permasalahan Mitra
1	Sumber Daya Manusia	1. Masih rendahnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada masyarakat desa. 2. Dalam masyarakat membutuhkan tutor penggiat yang memelopori desa pelopor Pancasila.
2	Pembangunan Kebudayaan	1. Tingkat Efisiensi pembangunan desa yang belum merata. 2. Pancasila belum secara efektif dikembangkan secara kelembagaan yang dipadukan dengan budaya lokal Klaten.

Tabel 2. Rekayasa Sosial dan Model *Grand Design* Pendidikan Karakter dalam Masyarakat

No	Permasalahan	Solusi yang ditawarkan	Luaran
1	Masih rendahnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat Desa.	Diklat Bina Karakter.	Meningkatnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat Desa.
2	Dalam Masyarakat membutuhkan Tutor Penggiat yang memelopori Desa pelopor Pancasila.	FGD Tutor Sebaya.	Tutor Penggiat yang memelopori Desa pelopor Pancasila, bekerjasama dengan Instruktur Lab Pancasila Unisri.
3	Tingkat Efisiensi pembangunan desa yang belum merata.	FGD Efisiensi pembangunan desa yang menjadi bahan rujukan materi Diklat Bina Karakter.	Tingkat Efisiensi pembangunan desa mengalami peningkatan 75%.
4	Pancasila belum secara efektif dikembangkan secara kelembagaan yang dipadukan dengan budaya lokal Klaten.	FGD Efektivitas Nilai Pancasila dalam bahan kajian Materi Diklat Bina Karakter.	Pancasila efektif 67% dikembangkan secara kelembagaan yang dipadukan dengan budaya lokal Klaten (Tarian, Makanan khas/ Kuliner).

Diklat Bina Karakter bagi desa pelopor Pancasila sebagai salah satu kegiatan yang terarah dan terukur untuk memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, pemberdayaan masyarakat tercapai. Selanjutnya dapat menghasilkan model pemberdayaan yang diwujudkan dalam sebuah Buku Panduan Diklat Bina Karakter yang berisi metode

grand design Pendidikan Karakter, serta artikel publikasi nasional, publikasi media massa.

Hasil pengabdian ini diharapkan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah berskala nasional yaitu berkaitan dengan rekayasa sosial dan model *grand design* pendidikan karakter dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti Tabel 2.

Tentunya melalui kegiatan pengabdian ini masyarakat dapat berperan secara aktif untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan segala hal yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sehingga diharapkan menjadi warga negara yang terampil dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara. Manfaat yang lain adalah untuk memberikan rekomendasi di tingkat nasional untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam membangun *character nationbuilding*.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

PKM ini dilaksanakan di Desa Mlese Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten (Gambar 1 dan Gambar 2). Tahapannya sebagai berikut:

1. Memberikan FGD pada Perangkat Desa yang akan menjadi tutor sebaya dalam kegiatan Diklat Bina Karakter.
2. Memberikan Diklat Bina Karakter bagi Masyarakat untuk mendukung sinergitas Karang Taruna dan masyarakat dalam menyokong Desa Pelopor Pancasila (Gambar 3 – Gambar 5).
3. Memasang plang dan sumber informasi lain dengan memadukan kemajuan teknologi melalui pembuatan video diklat yang bisa diakses melalui media sosial.
4. Membuat Buku Panduan Diklat yang akan dijadikan Modul Diklat Bina Karakter.
5. Membuatkan Hak Cipta untuk Produk Buku Panduan Diklat.
6. Melakukan publikasi media massa.
7. Melakukan publikasi ilmiah secara nasional terhadap keseluruhan produk hasil luaran program kemitraan masyarakat.



Gambar 1. Desa Mlese Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten



Gambar 2. Desa Mlese sebagai Desa Mitra LPPM Universitas Slamet Riyadi



Gambar 3. Pembukaan Diklat Pemberdayaan Desa Mlese



Gambar 4. Peserta Diklat Bina Karakter Wujudkan Desa Pelopor Pancasila



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Ketua Tim Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya

Pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila pada Karang Taruna Desa Mlese Kabupaten Klaten Menuju *Digital Society*

Anita Trisiana, Yusuf, Ama Farida Sari, Aiyu Nur Rohmah

dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, terdiri atas: (1) Robinson (1994), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak; serta (2) Payne (1997) dan Knirk, & Gustafson (1986), menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, menurut Mardikanto (2014), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”. Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha.
2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”. Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”. Perbaikan pendapatan

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Negara Indonesia didirikan di atas suatu dasar yakni Pancasila. Berarti dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia dengan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia. (Aunillah, 2011)

Implikasi Pancasila sebagai dasar negara, adalah bahwa Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum tersebut terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Pemuda-pemudi KarangTaruna telah mengetahui pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan 5 sila dalam Pancasila, selanjutnya dapat mematuhi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sikap yang dikembangkan untuk mendukung terwujudnya desa pelpor Pancasila, yang penuh dengan keberagaman sosial budaya di Indonesia, antara lain:

1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Untuk bisa

toleran terhadap suatu budaya, kita harus mengenal budaya lain. Kemudian, barulah bisa menimbang budaya tersebut berdasarkan konteksnya.

2. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya Mempelajari secara mendalam suatu budaya tertentu menjadikan seseorang peka dan sangat menghargai pengetahuan mengenai budaya tersebut. Ketika rasa penghargaan itu muncul, tentu kita tidak ingin orang lain merendahkan budaya yang kita senangi. Dengan demikian, kita juga seharusnya tidak merendahkan budaya lain, sebab kita akan turut merasakan betapa tidak nyamannya ketika budaya yang kita senangi dianggap remeh orang lain.
3. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri Indonesia merupakan salah satu negara dengan keadaan sosial budaya paling beragam di seluruh dunia. Sebagai misal, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, tidak termasuk dialek dan subdialek, dilansir Kemdikbud. Kekayaan budaya itu sudah cukup membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Belum lagi ragam budaya lain yang tak kalah banyaknya.
4. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia Budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui internet dan media massa memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, ada kalanya, budaya asing itu menggerus budaya asli Indonesia.

Pendampingan *Digital Society*

Interaksi masyarakat digital dilakukan secara daring melalui perangkat yang didalamnya terdapat media komunikasi dan informasi berupa aplikasi seperti media social. Pengertian masyarakat digital adalah masyarakat yang elemen didalamnya terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memengaruhi pola interaksi yang terjadi (Hill, 1991). Masyarakat digital atau disebut juga dengan masyarakat jejaring adalah manusia di

era sekarang ini dimana kehidupan manusia hampir sulit lepas dari keberadaan teknologi digital. Dimulai dari yang terdekat, manusia kini dalam kesehariannya menggunakan baik *smartphone*, *laptop*, *tablet*, komputer dan perangkat lain untuk berkomunikasi secara online dengan sesamanya dan mencari informasi melalui internet. Hal ini juga salah satu contoh sisi positif dalam masyarakat digital, dimana interaksi menjadi mudah hingga dapat meningkatkan produktifitas dalam keseharian. Namun, di era saat ini, tetap masyarakat digital harus selektif terhadap banyaknya arus interaksi yang terjadi.

Dampak perubahan pada masyarakat digital, di Indonesia harus sejalan dengan Nilai dasar pembangunan nasional Indonesia adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan. Nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Sedangkan nilai instrumen meliputi implementasi dan penjabaran dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2000; Lickona, 2004). Dimana implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik pada tataran perencanaan maupun tataran empirisnya.

Sinergi dan Dampak Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Terwujudnya Desa Pelopor Pancasila

Gerakan Nasional Revolusi Mental mendorong terwujudnya 5 gerakan perubahan Indonesia: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Tertib, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Tapi itu hanya kategorisasi karena sesungguhnya revolusi itu adalah kesinambungan dan hubungan yang tak saling putus. Sinergi atau kesinambungan gerakan revolusi mental, sejalan dengan nilai Pancasila, antara lain untuk mengukur

Pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila pada Karang Taruna Desa Mlese Kabupaten Klaten Menuju *Digital Society*

Anita Trisiana, Yusuf, Ama Farida Sari, Aiyu Nur Rohmah

keberhasilan nilai yang terbentuk dari pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, antara lain: Pertama, integritas. Bangsa ini harus punya integritas, yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, sesuai antara kata dan perbuatan, bertindak sesuai dengan aturan, bertumpu pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Kedua, kita mau menggalakkan nilai-nilai kemandirian. Etos kerjanya ditingkatkan, kerja kerasnya ditingkatkan, kreativitas, kemandirian, inovatif, itu untuk mengejar ketertinggalan. Yang ketiga spirit dari gotong-royong. Itu yang diimplementasikan, contohnya nanti seperti apa.

Revolusi Mental harus menunjukkan perbaikan. Misalnya masyarakat harus merasa ada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tapi masyarakat juga melakukan perubahan secara pelan-pelan ke depan. Contoh sederhananya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyerobot di jalan raya, (berlaku) disiplin, dan lain-lain.

Berikut ini terdapat sinergi model pemberdayaan masyarakat berbasis Pancasila sebagai dampak hasil kegiatan diklat bina karakter, yang diwujudkan dalam proses berikut ini:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya melalui Media Teknologi Komunikasi. Terjadi peningkatan sebanyak 63% Media Teknologi komunikasi telah berkembang dengan pesat saat ini. Hal ini ditandai dengan merebaknya pemakaian internet, multi media, dan sebagainya. Meningkat pesatnya teknologi komunikasi telah membawa kultur luar yang kadangkala asing masuk ke rumah kita. Teknologi telah membuat komunikasi menjadi mudah, praktis dan tidak terhindarkan.
2. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menunjukkan peningkatan 79% sepatutnya Pancasila sebagai pedoman pengembangan Model Komunikasi Antar Budaya. Proses pertukaran informasi antarbudaya merupakan salah satu cara mencapai efektivitas antarbudaya, selama proses komunikasinya berjalan baik, lancar, dan efektif. Komunikasi lintas budaya merujuk pada proses komunikasi bersifat komparatif. Sementara komunikasi antarbudaya lebih mengarah pada proses komunikasi antaranggota komunitas budaya yang berbeda. Perbedaan persepsi dalam komunikasi antarbudaya merupakan pembeda terhadap norma maupun pola pikir budaya yang ada dalam sebuah sistem budaya.

D. PENUTUP

Model pemberdayaan Desa Pelopor Pancasila, dengan model partisipatif menjadi langkah nyata yang dapat dilakukan oleh Karang Taruna sebagai perwujudan secara aktif dengan ikut 'terjun' dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Melalui kegiatan pemberdayaan, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan internalisasi pendidikan karakter, seluruh anggota karangtaruna dapat ikut serta mengamati, menganalisis, dan mengetahui masalah apa saja yang timbul di desanya masing-masing. Selain itu, melalui kegiatan pemberdayaan, karang taruna dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di pendidikan formal untuk mewujudkan hal positif di masyarakat di era *digital society*.

Tim Pengabdian pada masyarakat melakukan Training terhadap Karang Taruna di Desa Mlese Klaten, sebagai Desa mitra yang dijadikan desa pelopor Pancasila, dipadukan dengan pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan di Kabupaten Klaten sekaligus menopang *Digital Society*, yang menjadi pilar dalam pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat menuju transformasi digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2009). *Pendidik Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Koesuma, D. (2007). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Hasanah, A. (2009). *Pendidikan Berbasis Karakter*. Diakses pada 10 Juni 2010, dari <http://www.mediaindonesia.com/cetak/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter.html>.
- Irwan. (2010). *Landasan Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pendidikan.
- Kaelan. (2000). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop*. New York: Simon & Schuster, Inc.
- Ramly, M., dkk. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman Satuan Pendidikan Rintisan)*. Jakarta: Kemdiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Sugiaryo. (2012). *Strategi Pengembangan Grand Design Pendidikan Karakter*. Penelitian Fundamental Dikti
- Trisiana, A. (2019). Innovation Design Development of Citizenship Education Model on Characters of Indonesian Communities in Digital Media Era and Technology Revolution. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8 (2), 322-328.
- Trisiana, A. (2020). Digital Literacy Models for Character Education in Globalization Era. *Humanities & Social Sciences Reviews (HSSR)*, 8(1), 522-531.